

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI PUSKESMAS LAU KABUPATEN MAROS

Fatma¹, Rusli², Dwi Fitrah Wahyuni¹

¹D3 Farmasi Stikes Salewangang Maros

² Poltekes Kemenkes Makassar

*Email : fatmasonng30@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan obat dalam kegiatan pengadaan obat yang lemah mempengaruhi ketersediaan obat di puskesmas Lau di Kabupaten Maros. Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan gambaran mekanisme pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan oleh puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat observasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan obat di puskesmas di Kabupaten Maros terdapat dua macam sumber pembiayaan obat yaitu, melalui anggaran pendapatan belanja daerah dan Jaminan kesehatan nasional. Perencanaan obat yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah dilakukan melalui penyusunan laporan kebutuhan obat yang dibuat setiap tahun. Perencanaan dilakukan diakhir tahun untuk memenuhi kebutuhan obat puskesmas selama satu tahun kedepan. Sementara itu proses pengadaan obat dilakukan dengan menyusun laporan pemakaian dan lembar permintaan obat yang diajukan kepada gudang farmasi. Perencanaan obat yang berasal dari pembiayaan jaminan kesehatan nasional dilakukan menggunakan dokumen rencana kerja anggaran yang dibuat di awal tahun berdasarkan jumlah kebutuhan. Mekanisme pengadaan obat dilakukan melalui pemesanan dalam e-catalog sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas di Kabupaten Maros sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.

Kata kunci : perencanaan obat, pengadaan obat, puskesmas, peraturan

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya peluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*)(Kesehatan, 2014)

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efektif dan efisien untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak sesuai, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu pengelolaan obat dan pembekalan kesehatan di kabupaten/kota memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat untuk pelayanan kesehatan untuk menghindari kekosongan obat(Asi, Sakung and Kadri, 2019)

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka

penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Kesehatan, 2016)

Perencanaan yakni kegiatan seleksi obat dalam menentukan jumlah dan jenis obat dalam memenuhi kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas dengan pemilihan yang tepat agar tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, serta efisien. Perencanaan obat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan peningkatan efisiensi penggunaan obat, peningkatan penggunaan obat secara rasional dan perkiraan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan (Kesehatan, 2014).

Proses perencanaan kebutuhan obat per tahun dilakukan secara berjenjang (*bottomUp*). Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Selanjutnya Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas di wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia akan memperhitungkan waktu kekosongan obat, *buffer stock*, serta menghindari stok berlebih. (Kandou *et al.*, 2016)

Perencanaan pengadaan obat memiliki 2 metode, yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode konsumsi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis konsumsi logistik periode sebelumnya sedangkan metode epidemiologi merupakan metode perencanaan berdasarkan atas analisis jumlah kasus penyakit pada periode sebelumnya (Rahmawatie and Santosa, 2015).

Pengadaan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan didalam fungsi perencanaan. Proses pelaksanaan rencana pengadaan dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran. Tujuan pengadaan obat untuk memenuhi kebutuhan obat disetiap unit pelayanan kesehatan sesuai dengan pola penyakit di wilayah kerja puskesmas (Rosmania and Supriyanto, 2015).

Ketidakcukupan obat-obatan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat menentukan yaitu faktor perencanaan atau perhitungan perkiraan kebutuhan obat. Pengadaan obat juga merupakan suatu aspek dimana pemerintah dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan obat agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan obat. Terjaminya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan akan menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga pengelolaan dan penyediaan obat secara efektif dan efisien sangatlah penting (Pratiwi *et al.*, 2019).

Puskesmas Lau merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan dan pengadaan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui metode perencanaan dan pengadaan di Puskesmas Lau.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat observasi untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pengadaan dan perencanaan obat di Puskesmas Lau Kabupaten Maros. Waktu penelitian yaitu, Januari-Juni 2020 bertempat di Puskesmas Lau di Kabupaten Maros.

Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melalui:

1. Pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada apoteker dan asisten apoteker Puskesmas dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi dan table pengamatan.
2. Pengumpulan data sekunder yaitu digunakan dokumen standar oprasional prosedur tentang pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai.

Pengelohan Data dan Analisa Data

Data analisis secara deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara cermat berdasarkan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggambarkan mekanisme perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan di Puskesmas Lau Kabupaten Maros.

HASIL

Tabel 1. Perencanaan obat berdasarkan permenkes 74 Tahun 2016 di puskesmas di Kabupaten Maros

No	Elemen Persyaratan	Dilakukan	Tidak dilakukan	Hasil Observasi
1.	Perencanaan kebutuhan obat dilakukan oleh ruang farmasi puskesmas secara rutin	√		Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan membuat laporan kebutuhan obat(LKO) yang dibuatsetiaptahun.
2.	Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya yaitu pola konsumsi periode sebelumnya, pola penyakit, data mutase sediaan farmasi dan rencana pengembangan	√		Dalam kegiatan perencanaan kebutuhan dilakukan secara periodik berdasarkan pemakaian obat periode sebelumnya yang telah direkap dan dihitung
3.	Proses seleksi sediaan farmasi mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional	√		Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formulrium Nasional. Oleh karena dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016
4.	Perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit	√		Perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit dan pola konsumsi

Hasil wawancara di dapatkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 1. Bahwa perencanaan kebutuhan dilakukan proses seleksi sediaan farmasi yang dibutuhkan puskesmas .proses seleksi sediaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional sesuai dengan ketentuan dalam

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk mengetahui jumlah obat yang dibutuhkan untuk satu tahun, maka dilakukan perhitungan kebutuhan berdasarkan jumlah pemakaian obat pada tahun sebelumnya di Puskesmas.

Perhitungan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui jumlah obat yang dibutuhkan untuk satu periode. Hasil perhitungan yang didapatkan, dijadikan sebagai bahan analisis dengan rekapitulasi permintaan dari setiap poli sehingga menghasilkan usulan jumlah kebutuhan obat. Usulan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam laporan keadaan obat dan usulan obat untuk diajukan kepada dinas kesehatan kabupaten.

Implementasi kegiatan pengadaan obat di Puskesmas, terdiri dari dua sumber pembiayaan obat, diantaranya yaitu melakukan dana APBD dan dana Kapitasi Puskesmas atau JKN. Kedua pembiayaan ini dalam implementasinya tentu memiliki perbedaan, terutama berkaitan dengan pengadaan obat.

Tabel 2. Pengadaan obat berdasarkan permenkes 74 Tahun 2016 di Puskesmas di Kabupaten Maros

No	Elemen Persyaratan	Dilakukan	Tidak dilakukan	Hasil Observasi
1.	Menghitung persediaan obat dalam satuan terkecil untuk mencocokkan jumlah persediaan yang tercatat dalam kartu stok obat dengan jumlah fisik yang ada pada gudang	√		Menghitung persediaan obat dalam satuan terkecil dengan mencocokkan jumlah persediaan sesuai dengan kartu stok dan jumlah fisik yang ada, serta melakukan stock opname diakhir bulan atau diawal bulan
2.	Proses pengadaan obat, didasarkan pada kebutuhan pemakaian barang	√		Proses pengadaan, didasarkan pada kebutuhan pemakaian barang dan pola penyakit
3.	Mengatur pengiriman tepat waktu untuk menghindari kekurangan dan kehabisan barang	√		Mengatur pengiriman tepat waktu untuk menghindari kekurangan dan kehabisan barang

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2. Di Puskesmas Lau di Kabupaten Maros, diketahui bahwa petugas melakukan rekapitulasi pemakaian obat selama satu bulan terakhir dari poli-poli pelayanan, serta melakukan perhitungan stock opname perakhir bulan atau awal bulan, untuk permintaan bulan berikutnya. Proses pengadaan obat didasarkan pada kebutuhan pemakaian barang dan pola penyakit. Alur koordinasi pengadaan obat dengan membuat rencana perhitungan obat tahunan dengan membuat rencana kebutuhan obat (RKO) tahunan dan program Puskesmas. Dari rencana tahunan dipecah menjadi rencana bulanan, dari gudang farmasi terdapat obat tertentu, biasanya aitem obat yang telah direncanakan kepada gudang farmasi tidak tersedia sehingga untuk menanggulangi kekurangan tersebut digunakan dana JKN, untuk menghindari kekosongan karena itu mereka menyikapi dengan membeli ke PBF (Pedagang besar farmasi) dengan membandingkan harga PBF yang termurah.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di puskesmas Lau di Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lau di Kabupaten Maros. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di tempat penelitian.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Kesehatan, 2014).

Puskesmas Lau di Kabupaten Maros perencanaan kebutuhan obat dilaksanakan oleh ruang farmasi di puskesmas secara rutin setiap bulan melakukan permintaan obat berdasarkan pola penyakit dan pola konsumsi. Metode konsumsi suatu metode perencanaan obat yang berdasarkan pada kebutuhan nyata obat pada periode lalu dengan menyesuaikan dan koreksi berdasarkan pada penggunaan obat tahun sebelumnya. Sedangkan metode epidemiologi berdasarkan penyakit yang ada di Puskesmas atau yang paling sering terjadi di masyarakat. Perhitungan jumlah kebutuhan obat diambil data pemakaian masing-masing perunit dan memperhitungkan stok optimum dan masa tunggu waktu obat.

Petugas unit obat membagikan lembar permintaan obat yang dibutuhkan untuk satu tahun ke depan kepada setiap poli yang ada di puskesmas. Selanjutnya dokter atau tenaga medis disetiap poli akan mengisi jenis obat yang dibutuhkan selama satu tahun kedepan. Permintaan dari poli tersebut, selanjutnya oleh penanggung jawab obat akan dianalisis dan dimasukkan kedalam rencana kerja anggaran (RKA). Tahap perencanaan obat mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas Lau di Kabupaten Maros sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu penyusunan rencana kebutuhan obat harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan di Puskesmas yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Pengadaan obat dari gudang farmasi kabupaten memiliki kendala lain yaitu perencanaan waktu kedatangan obat dan jumlah yang diminta tidak sesuai sehingga puskesmas menyikapi dengan membeli ke PBF (Pedagang Besar Farmasi).

SARAN

Diharapkan dapat dijadikan penelitian selanjutnya mengenai perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas di Kabupaten Maros, kepada pihak puskesmas agar lebih memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana guna menjangkau pengelolaan obat di Puskesmas.

KEPUSTAKAAN

- Asi, A., Sakung, J. and Kadri, A. (2019) 'MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DI PUSKESMAS SNGURARA KELURAHAN DUYU KOTA PALU', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Kandou, R. D. *et al.* (2016) 'Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Berdasarkan Analisis Abc-Ven', *UNSRAT Manado*, 5(3), pp. 7–11.
- Kesehatan, M. (2014) *PERMENKES RI NO.75*. JAKARTA, INDONESIA.
- Kesehatan, M. (2016) *PERMENKES NO 74*. JAKARTA.
- Pratiwi, E. *et al.* (2019) 'GAMBARAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN OBAT DI PUSKESMAS RAWAT JALAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018', *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 8, p. 1.
- Rahmawatie, E. and Santosa, S. (2015) 'Sistem informasi perencanaan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali', *Pseudocode*, 2(1), pp. 45–52.
- Rosmania, F. A. and Supriyanto, S. (2015) 'Analisis Pengelolaan Obat Sebagai Dasar Pengendalian Safety Stock pada Stagnant dan Stockout Obat', *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 3(1), pp. 1–10.